

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Gorontalo



PENYERAHAN LAPORAN KEUANGAN *UNAUDITED* PEMERINTAH DAERAH DI GORONTALO TA 2023

Gorontalo, 28 Maret 2024

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 56 ayat (3) menyatakan bahwa “Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Gubernur/Walikota/Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Oleh karena itu setiap Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan setiap tahun nya. Pada Hari ini, Jumat 28 Maret 2024 Pemerintah Daerah se Provinsi Gorontalo menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 (*unaudited*) kepada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga No 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, Pukul 10.00 WITA, penyerahan Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten di Gorontalo yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 masing-masing Pemerintah Daerah, yang diserahkan kepada BPK merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara. Sesuai UU Keuangan Negara No 17 tahun 2003 pasal 31 menyatakan “Gubernur/Walikota/Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Dengan telah diterimanya LKPD tersebut, BPK akan segera melakukan pemeriksaan terinci. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara pada pasal 17 ayat 2 yang menyatakan, “BPK akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima Laporan Keuangan dari Pemerintah Daerah”. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo mengharapkan kerja sama dan komunikasi dapat terjalin dengan baik. Kepala Perwakilan juga berpesan agar bersama-sama selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, **Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA** menyampaikan BPK akan segera melakukan pemeriksaan terinci seperti yang kami sampaikan sebelumnya yaitu mulai tanggal 17 April 2023. Sasaran pemeriksaan LKPD TA 2023 adalah pada:

1. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2023;
2. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan SAL Tahun 2023;
3. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo

Website: gorontalo.bpk.go.id

Email: perwakilan.gorontalo@bpk.go.id

Instagram dan twitter: [bpkgorontalo](https://www.instagram.com/bpkgorontalo)

4. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
6. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Gorontalo berharap pemerintah daerah dapat menyediakan data, dokumen, dan informasi yang diperlukan dalam pemeriksaan. Selain itu, diharapkan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dilaksanakan secara optimal, termasuk rekomendasi terkait permasalahan yang dapat memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

Pada kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo juga memperkenalkan Tim yang akan bertugas pada pemeriksaan Terinci yang akan datang di hadapan para hadirin. BPK akan melaksanakan pemeriksaan dengan menerapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh BPK, yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme. Kami mohon dukungan Kepala Daerah untuk mendukung kami dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan yang bersih dan menjunjung tinggi nilai dan kode etik BPK termasuk kepada Tim Pemeriksa di lapangan. Terakhir kami mohon dukungan atas pembangunan Zona Integritas di BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.